

BAB V

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Banten untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan kebijakan ini tentunya tidak terlepas dari adanya pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Provinsi Banten. Hal ini diupayakan agar tidak terjadi tumpang tindih penyelenggaraan urusan pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal, sehingga menimbulkan adanya inefisiensi.

Berpijak pada upaya untuk mencapai sasaran dari Misi: “*Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas*” maka ditetapkan Kebijakan beserta Arah dan Fokus Kebijakan menurut Sasaran Misi, sebagai berikut:

Sasaran Misi		Kebijakan	Arah/Fokus Kebijakan
1.	Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat		
		1.1. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	● Pelestarian dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya ● Fasilitasi Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan dan kebudayaan ● Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan
2.	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan daya saing taraf pendidikan masyarakat		
		2.1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau	● Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ● Peningkatan mutu pendidikan, tenaga pendidik dan manajemen kependidikan ● Fasilitasi subsidi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan ● Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas lembaga pendidikan swasta ● Pembinaan dan fasilitasi minat dan budaya baca masyarakat ● Pelayanan pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
		2.2. Peningkatan penerapan pendidikan yang berwawasan lptek dan	● Fasilitasi pengembangan pendidikan kejuruan dan kewirausahaan

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
			berorientasi terhadap kebutuhan dunia usaha	• Fasilitas Pengembangan kerjasama pendidikan dengan dunia usaha
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat			
		3.1.	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	• Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan • Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan • Pengendalian dan pengawasan obat dan makanan • Perbaikan dan peningkatan gizi masyarakat • Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin
		3.2.	Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat	• Pembinaan kesehatan lingkungan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit • Pembinaan dan fasilitas kelembagaan kesehatan masyarakat
4.	• Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial • Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial			
		4.1.	Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	• Peningkatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial • Pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan sosial • Pembinaan dan peningkatan akses PMKS terhadap pelayanan kesejahteraan sosial • Pelayanan dan rehabilitasi sosial • Fasilitas bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
5.	• Meningkatnya kesempatan kerja • Menurunnya tingkat pengangguran • Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja • Meningkatnya perlindungan tenaga kerja			
		5.1.	Peningkatan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesempatan berusaha	• Fasilitas peningkatan kapasitas pelayanan lembaga ketenagakerjaan • Fasilitas pembinaan, pendidikan

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
				dan pelatihan ketenagakerjaan • Fasilitas kerjasama ketenagakerjaan dengan dunia usaha • Fasilitas penyelesaian perselisihan hubungan industrial • Fasilitas penumbuhan kewirausahaan • Peningkatan kerjasama pengawasan ketenagakerjaan antara kab./kota dan provinsi • Peningkatan kualitas SDM tenaga pengawas ketenagakerjaan
6.	Meningkatnya kesejahteraan hidup dan terbangunnya kemandirian transmigran			
		6.1.	Peningkatan taraf kesejahteraan dan kemandirian transmigran	• Fasilitas penciptaan lapangan kerja dan atau kesempatan berusaha • Fasilitas pelayanan perpindahan penduduk sesuai kebutuhan dan potensi sumberdaya • Peningkatan kerjasama penyelenggaraan transmigrasi dengan daerah lain
7.	• Meningkatkan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan desa			
		7.1.	Peningkatan kapasitas perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa	• Fasilitas dan pembinaan kapasitas kelembagaan perempuan dan perlindungan anak • Pembinaan dan pelatihan keterampilan dan manajemen usaha bagi perempuan • Peningkatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa • Peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan desa • Peningkatan kapasitas pemerintah desa/kelurahan • Fasilitas manajemen penyelenggaraan pembangunan partisipatif
8.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk			
		8.1.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengendalian penduduk	• Peningkatan fasilitas kapasitas kelembagaan keluarga berencana • Fasilitas peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana • Peningkatan kesertaan KB dan kesehatan reproduksi
		8.2.	Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan	• Fasilitas peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan

Sasaran Misi	Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
9. • Meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan • Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga			
	9.1.	Peningkatan peran dan partisipasi aktif kepemudaan dalam pembangunan	• Peningkatan kapasitas kelembagaan kepemudaan • Pembinaan pendidikan dan keterampilan usaha dan berusaha bagi pemuda
	9.2.	Peningkatan pemasyarakatan dan prestasi olah raga	• Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga • Peningkatan prasarana dan sarana olah raga • Pembinaan manajemen keolahragaan

Untuk mencapai sasaran dari Misi “**Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan**” maka ditetapkan kebijakan beserta arah dan fokus kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Misi	Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
1. • Meningkatnya investasi daerah • Meningkatnya pertumbuhan ekonomi • Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan			
	1.1.	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	• Penyederhanaan dan percepatan pelayanan investasi • Pemberian insentif pajak bagi investor • Jaminan kepastian hukum berusaha
			• Promosi investasi
	1.2.	Pengembangan dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi	• Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM • Pembinaan manajemen usaha • Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara usaha besar dengan UMKM-Koperasi • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk
2. • Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian,			

Sasaran Misi		Kebijakan	Arah/Fokus Kebijakan
	perkebunan, kehutanan dan kelautan		
		2.1.	• Optimalisasi produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
			• Diversifikasi, peningkatan kualitas dan pengembangan pasar produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
			• Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
			• Pembinaan manajemen usaha
			• Fasilitasi modal usaha • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kerjasama perdagangan • Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
3.	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri		
		3.1.	• Optimalisasi produktivitas dan pasar produk industri berbasis sumberdaya lokal
			• Pengembangan produk dan perluasan pasar industri kreatif dan industri strategis yang berorientasi ekspor
			• Optimalisasi dan pengembangan industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal yang ramah lingkungan • Fasilitasi aksesibilitas pasar • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku industri besar dengan pelaku industri kecil dan menengah • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar
4.	Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan		
		4.1.	• Diversifikasi produk dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar
			• Fasilitasi kerjasama perdagangan • Fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional) • Pengembangan dan peningkatan kualitas produk perdagangan yang berorientasi pasar
5.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata		
		5.1.	• Diversifikasi produk wisata dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata
			• Pembinaan keterampilan dan keahlian SDM pariwisata
			• Fasilitasi promosi, pemasaran dan kerjasama pariwisata
			• Penataan dan pengembangan destinasi pariwisata • Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana pariwisata • Fasilitasi kemitraan sinergis antara pelaku usaha pariwisata

Sasaran Misi		Kebijakan	Arah/Fokus Kebijakan
6.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan		
		6.1.	- Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa keuangan - Fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dalam pengembangan pelayanan jasa keuangan
7.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat		
		7.1.	Peningkatan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan
			- Pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan - Pembinaan dan pengembangan distribusi pangan - Pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan - Perumusan kebijakan ketersediaan, cadangan dan kerawanan pangan - Perumusan kebijakan distribusi, harga dan akses pangan - Perumusan kebijakan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan - Pemantapan kelembagaan ketahanan pangan
8.	Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional		
		8.1.	Peningkatan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional
			- Pembangunan dan peningkatan pelabuhan - Peningkatan daya dukung prasarana dan sarana penunjang pelabuhan - Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pelayanan kepelabuhanan
9.	Meningkatnya pelayanan sistem transportasi		
		9.1.	Peningkatan pelayanan jalan dan jembatan
			- Pengembangan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas - Pengembangan kerjasama pembangunan dan pengelolaan sistem transportasi penghubung antara P.Jawa - P.Sumatera
		9.2.	Peningkatan pelayanan angkutan darat, kereta api dan ASDP
			- Revitalisasi jaringan kereta api - Penataan dan pengembangan sistem dan moda angkutan umum yang nyaman, aman, terjangkau dan ramah lingkungan
		9.3.	Peningkatan pelayanan

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
			bandar udara	ada
				● Pengembangan bandar udara perintis di wilayah selatan
10.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air			
		10.1	Peningkatan pengelolaan sumberdaya air	● Peningkatan pengelolaan sumberdaya air (sungai, waduk, embung, situ) ● Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi
11.	● Meningkatnya pelayanan drainase ● Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir			
		11.1	Pengelolaan pengendalian banjir	● Pengelolaan prasarana pengendalian banjir ● Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan drainase
12.	Meningkatnya pelayanan air bersih			
		12.1	Peningkatan pelayanan air bersih	● Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana prasarana air bersih
13.	Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah			
		13.1	Peningkatan pengelolaan persampahan dan air limbah	● Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal) ● Pengembangan kerjasama manajemen pengelolaan sampah dan limbah regional
14.	Meningkatnya pelayanan energi dan listrik			
		14.1	Peningkatan pelayanan energi dan listrik	● Penataan dan pengembangan jaringan energi dan listrik ● Peningkatan pemanfaatan energi alternatif ● Peningkatan pelayanan jaringan listrik pedesaan
15.	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika			
		15.1	Peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika	● Penataan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika secara terpadu ● Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan
16.	Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau			
		16.1	Peningkatan pengembangan perumahan layak huni dan terjangkau	● Fasilitasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu ● Fasilitasi usaha pengembangan perumahan
17.	Berkurangnya kawasan			

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
	kumuh			
		17.1	Penataan dan pembangunan gedung serta revitalisasi kawasan kumuh	• Peningkatan daya dukung prasarana dan sanitasi lingkungan permukiman
				• Fasilitasi relokasi kawasan permukiman kumuh

Dalam rangka pencapaian sasaran dari **Misi “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari”** maka ditetapkan kebijakan beserta arah dan fokus kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah			
		1.1.	Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	• Sinkronisasi, harmonisasi dan pemaduserasian rencana tata ruang wilayah
				• Penegakan tertib pengendalian pemanfaatan ruang
				• Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang
				• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
		1.2.	Pengembangan pengelolaan kawasan strategis berbasis sumberdaya lokal	• Pengembangan kawasan strategis industri, perdagangan dan jasa di WKP I
				• Pengembangan kawasan strategis industri, pertanian, perdagangan dan jasa di WKP II
				• Pengembangan kawasan strategis pertanian di WKP III
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam			
		2.1.	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam	• Penataan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam pada kawasan budi daya
				• Penataan dan pelestarian fungsi sumber daya alam pada kawasan lindung
				• Pemulihan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam
				• Pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam
				• Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam
3.	• Terjaganya daya dukung lingkungan hidup • Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan			

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
	hidup	3.1.	Peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	● Pengembangan dan pendayagunaan teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan aktivitas budidaya
				● Pengendalian dan penegakan supremasi hukum lingkungan hidup
				● Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup
4.	Berkurangnya korban jiwa, kerugian moril dan kerugian materil akibat bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri	4.1.	Mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri	
				● Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri
				● Fasilitasi penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri

Untuk mencapai sasaran **Misi “Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa”** maka ditetapkan kebijakan beserta arah dan fokus kebijakan sebagai berikut:

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK	1.1.	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur	
				● Penataan dan optimalisasi tata kerja kelembagaan
				● Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur
				● Kompetensi sesuai bidang keahlian
				● Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana aparatur
2.	Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.1.	Peningkatan jenis dan kualitas data, perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	● Peningkatan kualitas kearsipan daerah
				● Pemutakhiran data dan informasi pembangunan daerah
				● Fasilitasi pelayanan umum pemerintahan pusat dan daerah
				● Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan rencana

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
				pembangunan daerah
		2.2.	Peningkatan kerjasama pembangunan	● Peningkatan kerjasama pemerintahan dengan pemerintah daerah lain ● Peningkatan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha, LSM, Ormas, Perguruan tinggi
3.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat			
		3.1.	Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat	● Penataan dan optimalisasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal layanan dasar ● Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya pelayanan dasar ● Desentralisasi secara bertahap kewenangan pelayanan dasar ● Peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan daerah ● Peningkatan dan pembinaan koordinasi dengan pemerintahan kab./kota dan instansi vertikal
4.	● Meningkatnya pendapatan daerah ● Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah ● Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah			
		4.1.	Peningkatan kapasitas pendapatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah	● Ekstensifikasi, intensifikasi dan optimalisasi sumber dan kapasitas pendapatan daerah ● Peningkatan kapasitas belanja daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik ● Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah
5.	Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta			
		5.1.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembiayaan pembangunan daerah	● Peningkatan kapasitas dan kualitas pembiayaan swadaya masyarakat ● Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
6.	Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan			
		6.1.	Fasilitasi pembinaan daerah otonom baru	● Pembinaan manajemen tata kelola pemerintahan ● Fasilitasi pembiayaan pembangunan daerah otonom baru
7.	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum			
		7.1.	Peningkatan kesadaran, kepatuhan dan penegakan	● Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi

Sasaran Misi		Kebijakan		Arah/Fokus Kebijakan
		peraturan perundang-undangan		tata nilai hukum
				● Penegakan dan penataan produk hukum daerah
				● Penegakan supremasi hukum
8.	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat			
		8.1.	Peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat	● Peningkatan pemahaman, penghayatan dan implementasi tata nilai demokrasi
				● Pembinaan dan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan politik
9.	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum			
		9.1.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum	● Peningkatan kesadaran dan penegakan budaya dan perilaku tentram dan tertib
				● Peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum